



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/6/2019
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Walikota Madiun wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- b. bahwa sehubungan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan telah dibahas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Madiun tanggal 21 Januari 2019 Nomor 170/125/401.040/2019 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
2. Surat Walikota Madiun tanggal 13 Maret 2019 Nomor 130/726/401.011/2019 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2018;

3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Madiun atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2018;
4. Hasil Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun tanggal 19 Maret 2019 dengan acara Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2018;
5. Hasil Rapat Paripurna Terbatas DPRD Kota Madiun pada tanggal 10 April 2019 dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota Madiun Tahun 2018;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 12 April 2019 dengan acara Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Madiun atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota Madiun Tahun 2018;

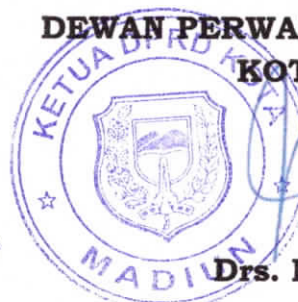
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Dengan keputusan ini memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2018;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 12 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,



Drs. ISTONO, M.Pd

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.040/6/2019
TANGGAL : 12 APRIL 2019

**REKOMENDASI DPRD KOTA MADIUN ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

A. PENGANTAR

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah berdasarkan regulasi tersebut dimaksudkan agar terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas dan bertanggungjawab, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan peraturan teknis yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat.

Memenuhi amanat Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis tentang LKPJ tersebut, mengakhiri tahun anggaran 2018, Walikota Madiun selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah, telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 beserta laporan anggarannya. Laporan kinerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ, yang antara lain berisi tentang:

1. Laporan arah kebijakan pembangunan,
2. Pengelolaan keuangan daerah secara makro,
3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi,
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

LKPJ yang disampaikan kepada DPRD Kota Madiun ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (evaluasi internal) DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terjadi *check and balances* sistem pemerintahan di daerah yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahapan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. Dimana tahun tersebut merupakan tahun perwujudan visi daerah yaitu **“Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera”**.

B. RUANG LINGKUP ANALISIS

Ruang lingkup analisis LKPJ Walikota Madiun tahun 2018 meliputi:

- 1. Capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah.
- 2. Capaian indikator kinerja keuangan daerah.
- 3. Capaian indikator kinerja Visi dan Misi Daerah.
- 4. Capaian indikator dari sisi 3 aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, Aspek pelayanan umum dan Aspek Daya saing daerah.
- 5. Capaian indikator kinerja per Urusan.

C. HASIL ANALISIS LKPJ WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

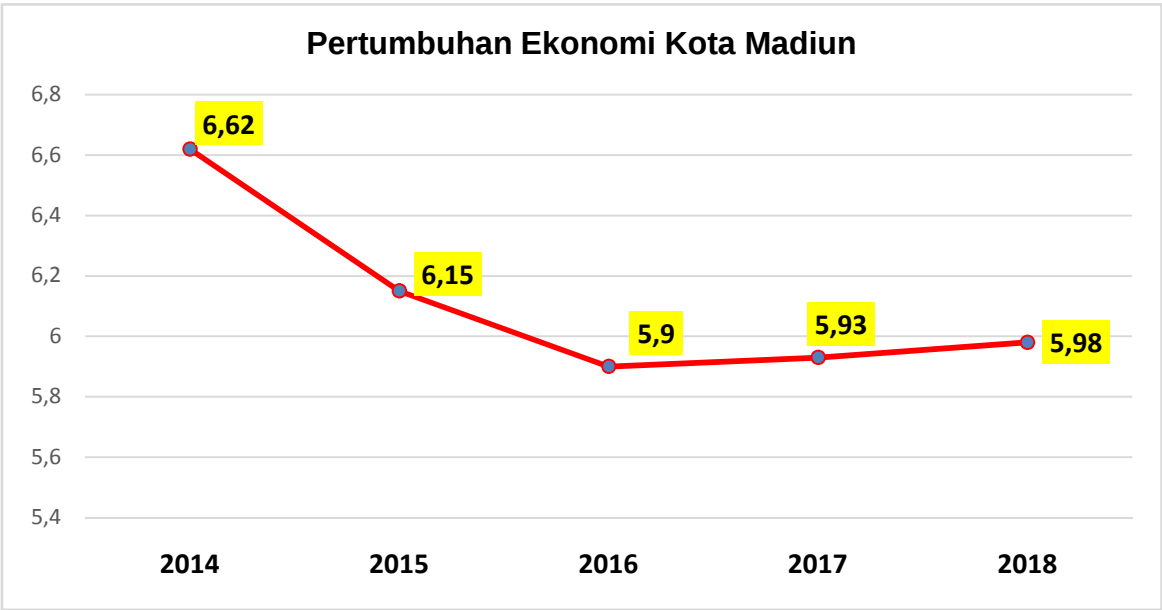
C.1. CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL DAERAH TAHUN2018:

Sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKPJ tahun 2018 pada Bab 1, bahwa Hasil-hasil Pembangunan ekonomi Kota Madiun sampai dengan tahun 2018 terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita. Naiknya Pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2018 ekonomi dapat tumbuh diatas rata-rata provinsi dan nasional (tahun 2018 ekonomi tumbuh 5,98%). Inflasi dapat ditekan dibawah 3% (inflasi tahun 2018 sebesar 2,71%). sebagaimana yang di sajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2015-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2018*	13.150.858,7	10.053.582,4
2017	12.140.200,5	9.486.136,6
2016	11.185.109,4	8.954.697,1
2015	10.192.067,5	8.455.436,3

Sumber : PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kota Madiun
*) Angka sementara, Tim Penyusun dan Perumus LKPJ 2018 Kota Madiun



Sumber : Data Demografi, Ekonomi dan Sosial Budaya Kota Madiun Th. 2017,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, BPS Kota Madiun

Demikian juga hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang cukup baik seperti IPM, AHH, AHS, Rata- rata lama sekolah, prosentase Penduduk miskin.

Berikut data hasil pembangunan sosial:

Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2018

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018**
Kabupaten Pacitan	64,92	65,74	66,51	
Kabupaten Ponorogo	68,16	68,93	69,26	
Kabupaten Madiun	69,39	69,67	70,27	
Kabupaten Magetan	71,39	71,94	72,60	
Kabupaten Ngawi	68,32	68,96	69,27	
Kota Madiun	79,48	80,01	80,13	80,15
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	

Sumber : Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2017

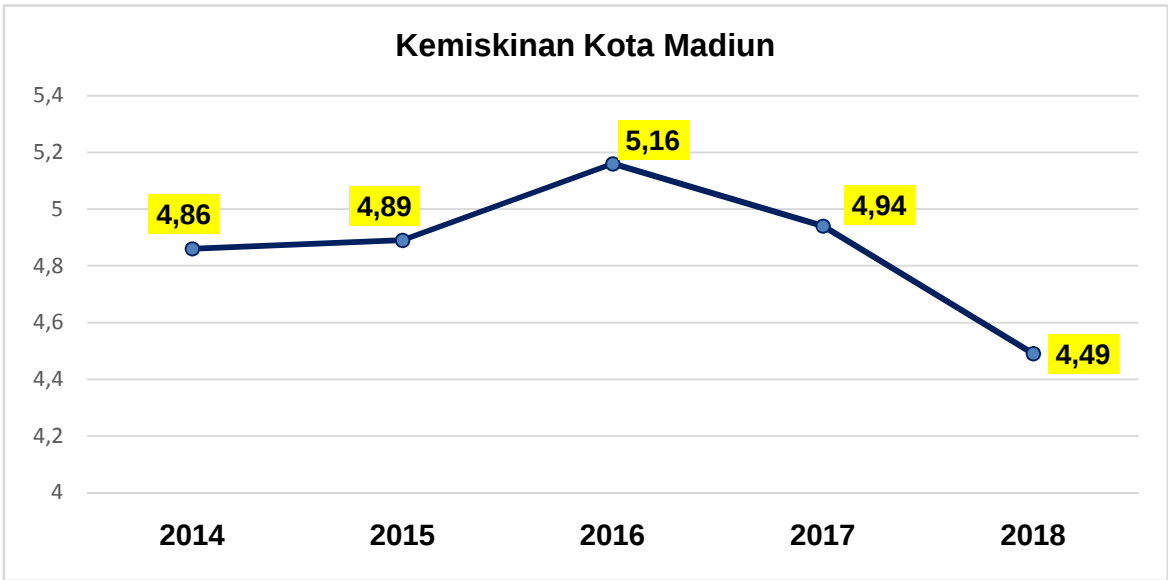
**) Angka sangat sementara, Tim Penyusun dan Perumus LKPJ 2018 Kota Madiun

Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2018

Tahun	AHH
2015	72,41
2016	72,44
2017	72,48
2018**	72,54

Sumber : Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2017

**) Angka sangat sementara, Tim Penyusun dan Perumus LKPJ 2018 Kota Madiun



Kondisi ekonomi makro dan sosial Kota Madiun yang semakin membaik di tahun 2018 patut diapresiasi karena ditengah situasi ekonomi nasional yang belum stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu, masih bergejolak karena efek perang dagang antara Amerika dan China. Namun belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab hasil-hasil pembangunan ekonomi dan sosial tahun 2018 tersebut semakin membaik. Faktor pendorong dan penentu keberhasilan ini baik eksternal maupun internal, penting untuk di ungkapkan dalam LKPJ agar para penentu kebijakan memperoleh pelajaran penting dari prestasi ini, sehingga prestasi ini dapat dipertahankan dan tentu di tingkatkan lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan yakni angka realisasi TPT pada tahun 2018 sebesar 0,81% yang mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 3,87% dimana tahun 2017 angkanya sebesar 4,68%. Dalam hal ini perlu didukung data yang valid dan sesuai dengan kriteria TPT, agar data tersebut tidak menyesatkan karena apabila disandingkan dengan data dari BPS Kota Madiun angka realisasi TPT pada tahun 2018 sebesar 3,85%, sementara di dalam Bab IV LKPJ Walikota Madiun halaman 195 target TPT pada tahun 2018 ada di angka 5,55% dan realisasinya sebesar 0,81%. Hal ini patut dipertanyakan karena untuk menurunkan prosentase TPT sebesar 0,81% tersebut memerlukan dana dan program kegiatan pembangunan yang cukup besar.

Pengangguran Terbuka merupakan ***prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja***. ***Pertanyaannya***, Dari data capaian TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 0,81% pada tahun 2018 tersebut, jenis /kelompok mana yang dominan jumlahnya, mereka yang:

1. *Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja.*
2. *Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha.*
3. *tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.*
4. *Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.*

Data tentang jenis penganggur terbuka ini tidak disajikan rinciannya dalam dokumen LKPJ, sehingga tidak diketahui pada kelompok/golongan penganggur yang mana yang dominan. Ketidak jelasan data ini tentu akan menyulitkan dalam penentuan kelompok sasaran program/kegiatan yang efektif untuk menurunkan TPT.

REKOMENDASI:

Terhadap hal ini direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun diharapkan dapat menyajikan data- data yang valid dan akurat terkait realisasi TPT Kota Madiun Tahun 2018 dan agar tahun-tahun selanjutnya dapat mensinkronkan data dengan Badan Pusat Statistik dan data dari Provinsi Jawa Timur agar tersaji data yang realistis, sehingga Pemerintah Kota Madiun dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah pengangguran terbuka di Kota Madiun, karena apabila data yang disajikan tidak valid maka akan sulit untuk menentukan program dan kegiatan dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang akan datang dan menyebabkan perencanaan tidak matang.
2. Pemerintah Kota Madiun diharapkan dapat menyajikan data tentang jumlah dari setiap kelompok penganggur terbuka karena data ini penting untuk dasar perbaikan kebijakan ekonomi pada tahun yang akan datang dengan sasaran menurunnya pengangguran terbuka di Kota Madiun.

Prosentase penduduk miskin tahun 2018 turun cukup signifikan, melebihi rata rata penurunan kemiskinan empat tahun yang lalu (2014-2017). Kemiskinan tahun 2018 sebesar 4,49% dari jumlah penduduk (lebih rendah dari tahun awal RPJMD 2014) dan turun 0,45% dibanding tahun 2017. Artinya pemerintah daerah sudah mulai menemukan cara-cara yang lebih efektif menurunkan angka kemiskinannya. Untuk itu strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan selama ini diyakini efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin terus disempurnakan. Dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya (antara 0,5 – 1% pertahun) dan diharapkan Kota Madiun mampu mengejar target SDGs, bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.

Hampir setiap tahun dokumen LKPJ tidak menyajikan informasi dimana kantong kemiskinan (kelurahan dan kecamatan) berada, Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kota Madiun dapat menyajikan data kemiskinan perkelurahan/kecamatan di Kota Madiun, agar petanya jelas dan dapat diverifikasi, dengan demikian akan memudahkan dalam intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan lokasi yang dibutuhkan agar program/kegiatan semakin efektif.

C.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH

C.2.1. Realisasi keuangan daerah tahun 2018:

Dokumen LKPJ Walikota Madiun tahun 2018 pada Bab III tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2018, melaporkan bahwa:

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun tahun 2018 melampaui target sebesar **Rp.30.530.220.628,-**ter-realisasi sebesar **103,12%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. Sementara realiasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.248.924.251.099** ter-realisasi **80,64%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di Tahun Anggaran 2018. APBD tahun 2018 setelah perubahan semula diproyeksi Defisit (**Rp.308,4 M**) pada Realisasinya defisit berkurang tinggal sebesar (**Rp.29,0 M**). Sebagaimana dalam Ringkasan berikut ini (dikutip dari dokumen LKPJ 2018 pada Bab III setelah data diolah):

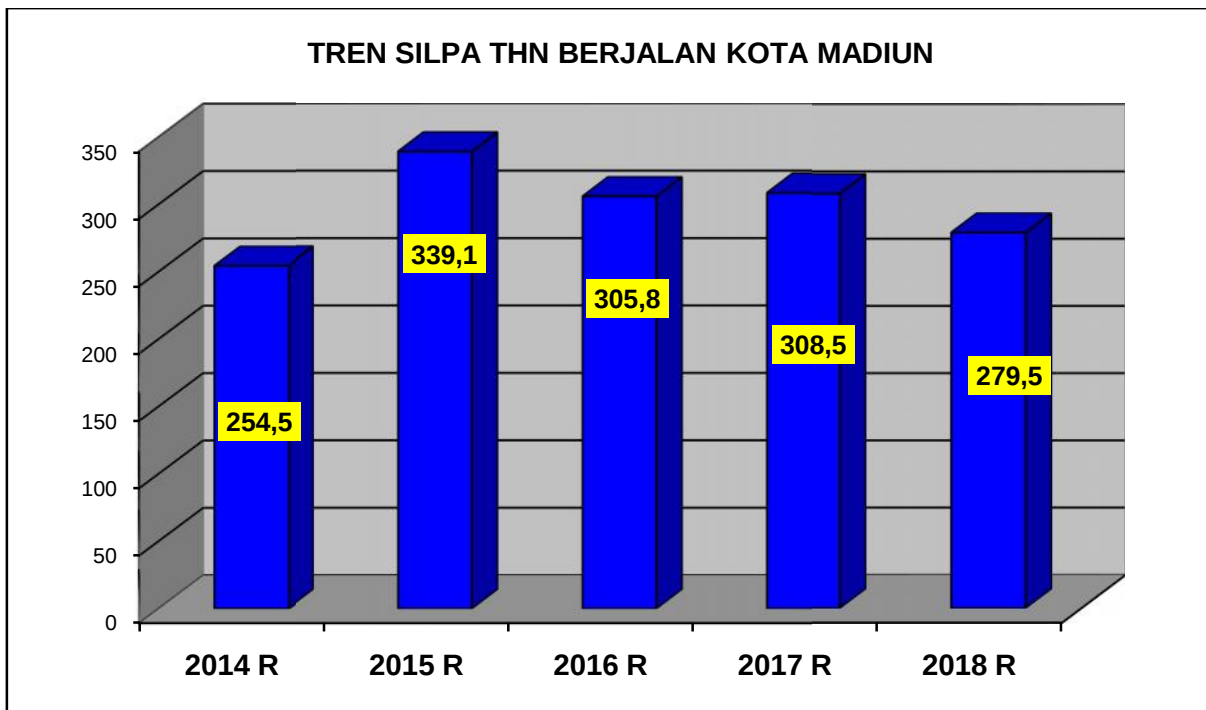
RINGKASAN REALISASI APBD 2018 KOTA MADIUN
(LKPJ BAB III)

Ringkasan Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	% Capaian
I	Pendapatan	957.624.973.325,14	977.096.842.937,00	1.007.627.063.565,05	103,12
1	PAD	230.608.717.369,14	206.173.394.937,00	231.024.378.926,73	112,05
2	Dana Perimbangan	638.973.881.834,00	663.613.974.000,00	678.417.066.007,00	102,23
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	88.042.374.122,00	107.309.474.000,00	98.185.618.631,32	91,50
II.	Belanja	954.991.703.029,81	1.285.587.599.826,46	1.036.663.348.727,75	80,64
1	Belanja Tidak Langsung	351.277.112.926,31	588.015.295.942,46	407.189.651.557,00	69,21
2	Belanja Langsung	603.714.590.103,50	697.572.303.884,00	629.473.697.170,75	90,28
	Surplus/ (defisit)	2.633.270.295,33	(308.490.756.889,46)	(29.036.285.162,70)	
III	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	308.491.416.889,46	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	308.491.416.889,46	100,00
	Sisa Lebih Anggaran (SILPA)	308.490.756.889,46	0,00	279.455.131.726,76	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun

SILPA tahun 2018 *un-audited* dalam dokumen LKPJ dilaporkan sebesar **Rp.279.455.131.726,76** secara nominal menurun dibanding SILPA tahun 2017, seperti yang nampak dalam grafik dibawah ini:

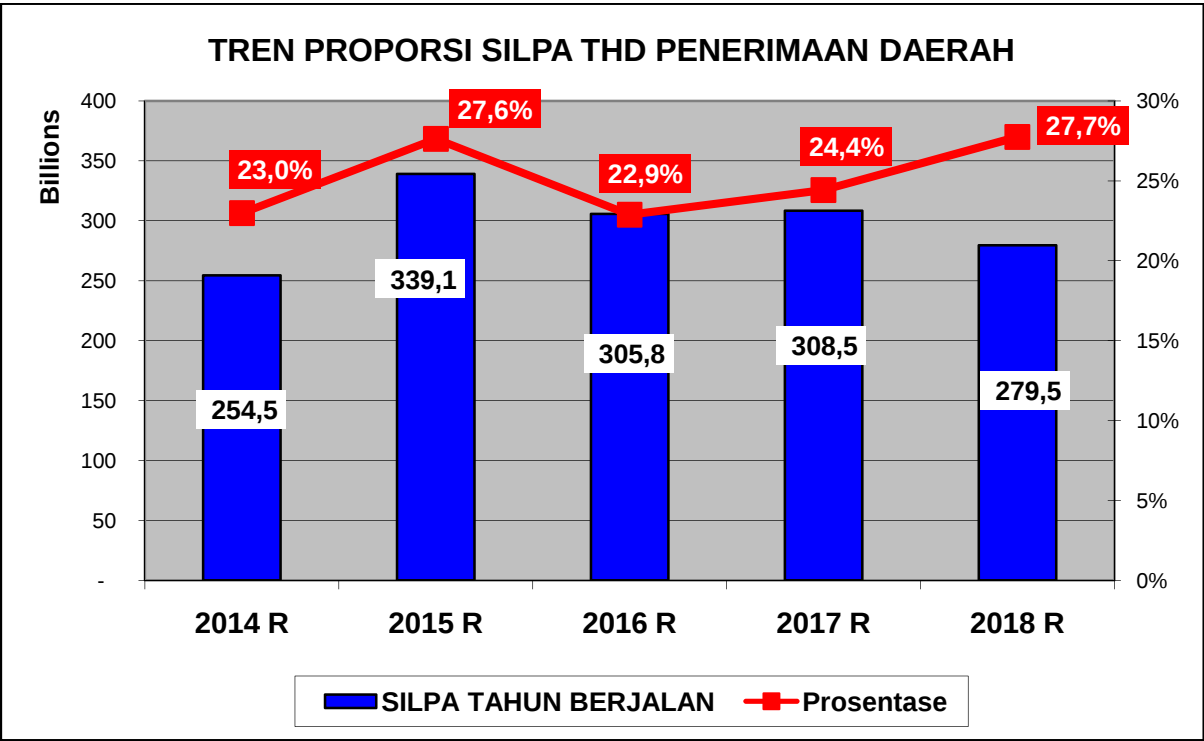


Berdasarkan penjelasan pada bab III LKPJ, atas besaran silpa tahun berjalan tersebut telah diuraikan berdasarkan sumbernya sehingga diketahui bahwa, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp.279.455.131.726,76 yang belum terikat sesuai penggunaannya sebesar **Rp.253.185.778.740,-** sedangkan sisanya sebesar Rp.26.269.352.986,00 sudah terikat penggunaannya. sesuai rincian sebagaimana yang diuraikan dalam LKPJ bab III sbb:

1. SILPA Mandatory sebesar Rp 26.269.352.986,00 yang terdiri dari :
 - Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.12.310.903.077,00
 - Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.8.612.825.330,00
 - Sisa Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp.5.209.737.079,00
 - Sisa Dana BOS sebesar Rp.135.887.500,00
2. SILPA Murni terdiri dari :
 - Pelampauan Pendapatan sebesar Rp.30.530.220.628,05
 - Belanja Tidak Langsung yang tidak terserap sebesar Rp.175.496.619.685,46 meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.61.257.134.129,00
 - 2) Belanja Hibah sebesar Rp.5.474.961.869,00
 - 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.4.114.508.010,00
 - 4) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.104.650.015.677,46
 - Belanja Langsung yang tidak terserap sebesar Rp.47.158.938.427,25

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah apakah jumlah tersebut sudah termasuk penggunaan pembiayaan untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2019 dan berapa defisit APBD tahun anggaran berjalan.

Secara agregat besaran SILPA tahun berjalan 2018 memang menurun dibanding tahun 2017, akan tetapi jumlahnya masih dirasa cukup besar jika diukur dari dana tersedia (Pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan) sebesar 27,7%, justru prosentasenya meningkat dibanding tahun 2017. Artinya besarannya masih jauh diatas ideal (kurang dari/maksimal 5% dari dana tersedia).



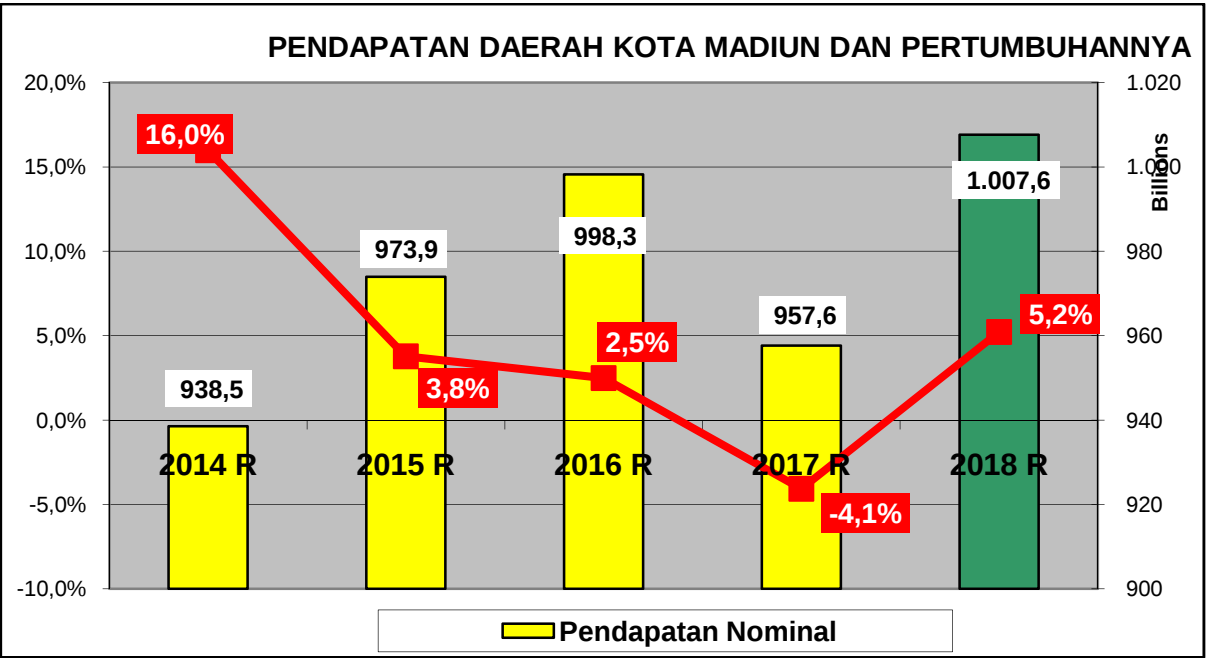
Cukupnya besarnya SILPA tahun berjalan tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 belum efektif mampu memperbaiki manajemen pengelolaan anggaran, memang pada Bab III LKPD Walikota Madiun telah menyajikan beberapa solusi yang selama ini (pada Tahun Anggaran 2018) telah di jalankan seperti:

1. Dari sisi perencanaan melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2019.
2. Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.

- 3. Koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta TP4D guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut untuk diberlakukan di tahun berikutnya, karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran.
- 4. Telah melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas Silpa tahun 2017 pada kas daerah dengan deposito pada Bank Jatim.

Namun solusi tersebut nampaknya belum cukup efektif untuk meningkatkan performa belanja daerah Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2018, untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat bekerja lebih keras lagi meningkatkan serapan anggarannya setiap tahun.

Kinerja Pendapatan daerah cukup baik, dimana pendapatan daerah tahun 2018 dapat tumbuh 5,2% meningkat dibanding tahun 2017. Tahun 2018 Pendapatan kota Madiun tembus 1 Triliun lebih.



Agar performa APBD tahun yang akan datang lebih baik, maka diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap rumusan kebijakan keuangan daerah pada masa yang akan datang, juga evaluasi menyeluruh pada semua tahapan manajemen keuangan daerah, seperti:

1. Apakah perencanaan anggarannya yang tidak tepat sesuai kebutuhan.
2. Apakah Pelaksanaannya yang tidak akurat dan tidak efisien serta tidak efektif.
3. Apakah Pengendalian/kontrol/Pengawasannya yang lemah.
4. Apakah Kualitas personalianya (*man power*) yang rendah.

Atau oleh sebab lain yang tentu harus diurai satu persatu, sehingga ditemukan solusi yang efektif untuk peningkatan serapan anggaran yang lebih maksimal.

D. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN MISI DAERAH

Sebagaimana yang tersaji dalam Bab II Dokumen LKPJ Walikota Madiun Tahun 2018, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun selama Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Walikota terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Visi Kota Madiun adalah : **Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera”**.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan juga 4 poin misi daerah, yaitu:

1. **Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris).**
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.**
3. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.**
4. **Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.**

Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 yang sekarang dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKPJ, berdasarkan RKPD 2018 telah ditetapkan 6 prioritas pembangunan Kota Madiun tahun anggaran 2018, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Pelayanan Publik;
6. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Karena LKPJ Walikota Madiun tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban tahun tahapan akhir RPJMD 2014-2019, maka indikator tujuan sebagai indikator komposit dari indikator sasaran dan program tentu sudah dapat diukur sejauhmana capaian keberhasilannya, maka analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ tahun 2018 saat ini, pengukurannya sesuai dengan RPJMD Bab V tabel 5.4 tentang keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014-2019. Artinya sejauhmana capaian keberhasilan dan atau kegagalan dalam mencapai misi daerah setiap tahun, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai RPJMD bab V tersebut, dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2018 konsisten dengan RPJMD. Berikut hasil pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya :

Berdasarkan table 5.4. dalam Bab V RPJMD Kota Madiun 2014-2019, untuk mengukur keberhasilan **4 misi** tersebut telah ditentukan **7 Tujuan, 14 sasaran serta 29 indikator beserta target kinerjanya**, Rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Jumlah
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	4
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11
Jumlah	29

Capaian Misi daerah berdasarkan indikator sasaran:

Dari 29 indikator pengukuran kinerja setiap misi dalam dokumen RPJMD seluruhnya telah dilaporkan capaian kinerjanya dalam LKPJ 2018, disajikan dalam bab IV tentang Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hasil olah data dokumen LKPJ AMJ pada capaian Indikator kinerja sasaran berdasarkan kelompok misi daerah, didapat bahwa:

- Sampai dengan tahun 2018, indikator Misi yang mencapai/melampaui target sebanyak 24 indikator (tingkat ketercapaian 82,76%) artinya dari 29 indikator kinerja sampai dengan TA 2018, sebanyak 82,76% telah mencapai/melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dan sisanya sebanyak 5 indikator tidak mencapai target. Rekapitulasi capaian 2018 selengkapnya sebagaimana yang telah direkap dalam tabel berikut:

Misi	Tercapai	Tidak tercapai	Jumlah Indikator	% Tercapai
Misi 1: Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	2	1	3	66,67%
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	3	1	4	75,00%
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11		11	100,00%
Misi 4: Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	8	3	11	72,73%
Jumlah/Prosen	24	5	29	82,76%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi atau melampaui target indikator kinerja Misi daerah dalam RPJMD sampai dengan tahun ke empat RPJMD, yaitu LKPJ tahun 2018, bahwa:

- **Pemerintah Kota Madiun berhasil dengan prestasi membanggakan memenuhi/melampaui target indikator kinerja misi ke 3.**
- **Pemerintah Kota Madiun berhasil dengan prestasi cukup/sedang memenuhi/melampaui target indikator kinerja misi ke 1,2 dan 4.**

Hasil perhitungan tersebut diatas berbeda dengan hasil perhitungan sendiri oleh tim penyusun LKPJ 2018, dimana pada bab IV dokumen LKPJ gambaran makro table IV.2. baik capaian per misi maupun capaian indikator secara keseluruhan misi hasilnya 86,21%. Perbedaan ada pada hitungan capaian indikator sasaran misi ke- 4. Berikut kutipan tabelnya:

Tabel IV.2
Indikator Kinerja berdasarkan Misi Daerah
Tahun 2018

Misi	Jumlah	Tercapai	Tidak tercapai	%
1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat	3	2	1	66,7%
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	4	3	1	75%
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	11	11	0	100%
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	11	9	2	81,8%
Jumlah Indikator	29	25	4	86,21%

Disamping itu juga ditemukan 17 indikator dari 29 indikator sasaran akhir RPJMD (yaitu tahun 2019) yang sampai dengan realisasi TA 2018 **sudah mencapai dan atau melampaui target**, sebagai berikut:

Indikator sasaran	R 2018	T 2019
1. Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	108	108
2. Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,85	79,5
4. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP
5. Angka Melek Huruf	100%	100%
6. Angka Kematian Ibu (AKI)	0%	38,59%
7. Angka Kematian Bayi (AKB)	6,64%	6,95%
8. Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	94,51%	93%
9. Rasio Rumah layak Huni	99,65%	99,42%
10. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,61%	1,50%
11. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19,55%	19%
12. Nilai realisasi Investasi	966,734	361
13. Tingkat Pengangguran Terbuka	0,81%	5,08%
14. Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	17,48%	17,20%
15. Rasio Ketersediaan Pangan Utama	154,48	46,5
16. Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan	100%	100%
17. Angka kriminalitas tertangani	100%	100%

Rekomendasi:

Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator misi daerah sebagaimana tabel diatas, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun ke lima RPJMD Tahun 2014-2019 maka, program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2019. Sebagai tahun akhir RPJMD, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada **sasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target**, sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi Indikator Sasaran Yang Tahun 2018 Tidak Mencapai Target

Misi	Sasaran	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	%	Status
Misi 1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82,48	82,19	99,65%	Tidak tercapai
Misi 2	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	BB	B	90%	Tidak tercapai
Misi 4	Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB	23,71%	23,21%	98%	Tidak tercapai
	Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB	16,32%	16,09%	99%	Tidak tercapai
	Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,33	0,36	92%	Tidak tercapai

Untuk indikator kinerja baik indikator tujuan maupun sasaran yang sampai dengan tahun 2018 targetnya sudah tercapai/terlampaui, agar tidak terjadi kemunduran kualitas perencanaan pembangunan, maka hendaknya pada RKPD perubahan 2019 target kinerja nya dapat di tingkatkan melebihi RPJMD yang sekarang masih berlaku. Dengan demikian kualitas perencanaan daerah akan semakin lebih maju, realistis, sesuai kebutuhan dan akuntabel.

E. EVALUASI KINERJA BERDASARKAN ASPEK PEMBANGUNAN DAERAH.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya diukur dari Aspek, Fokus, dan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah terbagi dalam 3 aspek yakni:

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
- 2. Aspek Pelayanan Umum.
- 3. Aspek Daya Saing Daerah.

Artinya setiap tahun evaluasi penyelenggaraan Otonomi daerah diukur dari sejauhmana capaian setiap daerah mampu meningkatkan 3 aspek tersebut.

Hasil penelusuran atas dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 pada bab IX tentang penetapan indikator kinerja daerah, bahwa penetapan indikatornya sudah dikelompokkan berdasarkan kategori 3 aspek tersebut, jumlah seluruh indikator sebanyak 388 indikator, dengan rincian per aspek sebagai berikut :

Aspek	Jumlah
1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26
2. Aspek Pelaynan Umum	327
3. Aspek Daya Saing	35
Jumlah Indikator	388

LKPJ Walikota Madiun telah mampu mengukur sendiri capaian pembangunan daerah berdasarkan 3 aspek pembangunan tersebut diatas, sebagaimana dikutip dari Table IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Capaian Aspek Pembangunan Daerah Tahun 2018

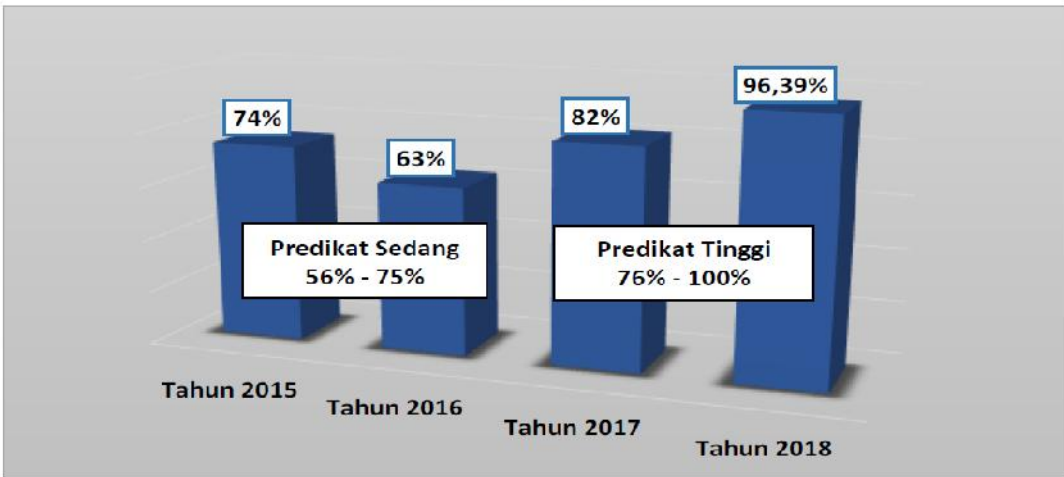
Aspek	Jumlah	Tercapai	Tidak tercapai	%
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26	25	1	96,15%
Aspek Pelayanan Umum	327	315	12	96,33%
Aspek Daya Saing Daerah	35	34	1	97,14%
Jumlah	388	374	14	96,39%

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

Hasil olah data dokumen LKPJ pada bab IV sebagaimana tabel di atas, bahwa, dari total indikator berdasarkan 3 aspek pembangunan sebanyak 388 Indikator kinerja, pada tahun 2018 yang mencapai/melampaui target sebesar 374 indikator (tingkat ketercapaian 96,39%), sebanyak 14 indikator tidak mencapai target. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengukuran aspek kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sampai tahun 2018, Pemerintahan Kota Madiun: **Berhasil dalam meningkatkan seluruh aspek pembangunan, dengan prestasi yang membanggakan/tinggi** oleh karena itu patut diapresiasi.

Prestasi yang cukup membanggakan dari ke tiga aspek pembangunan tersebut, dilaporkan dalam LKPJ memang merupakan kerja keras dari semua pihak, dengan strategi percepatan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir (20117-2018). Sehingga capaian kinerja pembangunan daerah pada periode akhir RPJMD 2014-2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015-2016 predikat kinerjanya sedang, sedangkan pada periode tahun 2017-2018 predikatnya tinggi. Artinya telah dilakukan percepatan pembangunan pada tiap-tiap aspek dengan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Madiun berserta DPRD Kota Madiun melalui kebijakan anggaran yang memadai dan perbaikan program/kegiatan. Berikut grafik dan tabel capaian kinerja pada 2015 – 2018:

Grafik IV.1
Capaian Aspek Pembangunan Daerah
Tahun 2015 s.d. 2018



Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

Tabel IV.6
Perkembangan Capaian Aspek Pembangunan Daerah
Tahun 2015 s.d. 2018

Aspek	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	56%	60%	72,0%	96,15%
Aspek Pelayanan Umum	75%	63%	82%	96,33%
Aspek Daya Saing Daerah	75%	63%	89%	97,14%
Jumlah	74%	63%	82%	96,39%

Sumber : Tim Teknis dan Perumus LKPJ

F. CAPAIAN KINERJA PER URUSAN PEMDA.

Capaian LKPJ 2018 terhadap Indikator Urusan Pemerintah Daerah

Urusan	Tercapai	Tidak Tercapai	Jumlah	% Tercapai
1) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9		9	100,00%
2) Kearsipan	3		3	100,00%
3) Kebudayaan	10		10	100,00%
4) Kecamatan	13		13	100,00%
5) Kelautan dan Perikanan	3		3	100,00%
6) Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan	6	1	7	85,71%
7) Kesatuan Bangsa dan Politik	7		7	100,00%
8) Kesehatan	35	1	36	97,22%
9) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20		20	100,00%
10) Ketransmigrasian	2		2	100,00%
11) Keuangan	9	1	10	90,00%
12) Komunikasi dan Informatika	19	1	20	95,00%
13) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9		9	100,00%
14) Lingkungan Hidup	15		15	100,00%
15) Manajemen Pelayanan Pendidikan	3		3	100,00%
16) Otonomi Daerah	5	1	6	83,33%
17) Pangan	3		3	100,00%
18) Pariwisata	4		4	100,00%
19) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13		13	100,00%
20) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8		8	100,00%
21) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	1	8	87,50%
22) Pemuda dan Olah Raga	2		2	100,00%
23) Pemuda dan Olahraga	10		10	100,00%
24) Penanaman Modal	10		10	100,00%
25) Pendidikan	8		8	100,00%
26) Penelitian dan Pengembangan	1		1	100,00%
27) Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3		3	100,00%
28) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	1	5	80,00%

29)	Perdagangan	8	1	9	88,89%
30)	Perencanaan	16		16	100,00%
31)	Perhubungan	19	1	20	95,00%
32)	Perindustrian	6	1	7	85,71%
33)	Perpustakaan	5		5	100,00%
34)	Pertanahan	2		2	100,00%
35)	Pertanian	17	1	18	94,44%
36)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14		14	100,00%
37)	Sosial	5	2	7	71,43%
38)	Statistik	3		3	100,00%
39)	Tenaga Kerja	11		11	100,00%
40)	Unsur Staf	15	2	17	88,24%
Jumlah/Prosen		376	15	391	96,16%

Demikianlah Rekomendasi DPRD Kota Madiun terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Madiun Tahun 2018 yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita sadari bersama bahwa rekomendasi yang telah disampaikan ini merupakan salah satu manifestasi kepedulian kita terhadap perbaikan pembangunan Kota Madiun ke depan, agar program pembangunan daerah Kota Madiun terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 12 April 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua,


Drs. ISTONO, M.Pd